

## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

# LAPORAN SINGKAT KOMISI V DPR RI

(BIDANG PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN DAERAH TERTINGGAL, TRANSMIGRASI, BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA (BMKG), DAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN (BNPP/BASARNAS)

------

Tahun Sidang : 2025 – 2026

Masa Sidang : I

Rapat : Ke - 5

Jenis Rapat : Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat

Hari/Tanggal : Senin, 8 September 2025

Sifat : Terbuka

Pukul : 13.20 WIB s.d 18.05 WIB

Tempat : Ruang Rapat Komisi V (Ruang KK V) Gedung Nusantara DPR RI.
Acara : 1. Pembahasan RKA-K/L 2026 Berdasarkan Nota Keuangan dalam

**RAPBN 2026.** 

2. Penetapan RKA-K/L Tahun 2026.

3. Pendalaman Pembahasan RKA-K/L dalam RAPBN TA 2026

dengan Unit Organisasi Eselon I masing-masing K/L.

Ketua Rapat : Lasarus, S.Sos.,M.Si. Sekretaris : Nina Herlina, S.H.

Hadir Anggota : .... dari 48 orang Anggota Komisi V DPR RI.

Hadir Mitra : Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

(BNPP/Basarnas) beserta jajaran.

## **KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT**

#### I. PENDAHULUAN

- 1. Rapat dibuka pada pukul 13.20.WIB setelah kuorum terpenuhi dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
- 2. Ketua Rapat menyampaikan bahwa agenda Raker dan RDP Komisi V DPR RI dengan Wakil Menteri Desa dan PDT dan Kepala BNPP/Basarnas pada hari ini adalah Pembahasan RKA-K/L 2026 Berdasarkan Nota Keuangan dalam RAPBN 2026, Penetapan RKA-K/L Tahun 2026 dan Pendalaman Pembahasan RKA-K/L dalam RAPBN TA 2026 dengan Unit Organisasi Eselon I masing-masing K/L.
- 3. Ketua Rapat mempersilakan kepada Wakil Menteri Desa dan PDT dan Kepala BNPP/Basarnas untuk menyampaikan paparan dan penjelasannya.
- 4. Ketua Rapat mempersilakan kepada Anggota Komisi V DPR RI untuk menyampaikan pertanyaan dan tanggapan.

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT:

- 1. Komisi V DPR RI menyetujui Penambahan Pagu Anggaran TA 2025:
  - a. Kementerian Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), sesuai dengan surat dari Menteri Desa PDT Nomor: B-748/KEU.00.05/IV/2025 berperihal Permohonan relaksasi Buka Blokir dan Penambahan ABT Kemendesa PDT TA 2025 Tanggal 29 April 2025 dan Surat Menteri Desa PDT Nomor: B-1123/KEU.00.05/IV/2025 tanggal 10 Juli 2025 yang disusuli dengan Surat Menteri Desa PDT Nomor: B-1430/KEU.00.05/VIII/2025 tanggal 20 Agustus 2025 hal Permohonan Relaksasi Buka Blokir Kemendesa PDT TA 2025 dan surat dari Kementerian Keuangan Nomor S-342/AG/AG.4/2025 tanggal 30 Juni 2025 perihal Pengesahan Revisi Anggaran Kemendes PDT TA 2025 sebagai berikut:

dalam ribu rupiah

KEMENTERIAN	PAGU EFEKTIF (TGL 30 JUNI 2025)	PERUBAHAN (BUKA BLOKIR)	PAGU EFEKTIF TOTAL APBN TA 2025	
	Α	В	C = A + B	
Kementerian Desa Dan				
Pembangunan Daerah	1.733.871.861	382.733.245	2.116.605.106	
Tertinggal (PDT)				

b. Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan (BNPP)/ Basarnas, sesuai dengan surat dari Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan (BNPP)/ Basarnas Nomor: B/ 4902/KU.01.01/IX/BSN-2025 berperihal Penyampaian Perkembangan Pagu Efektif Basarnas Tahun 2025 Tanggal 8 September 2025, dan surat dari Kementerian Keuangan Nomor S-649/AG/AG.3/2025 dan S-312/AG/AG.3/2025 Perihal Pengesahan Revisi Anggaran di Lingkungan Basarnas TA 2025 tanggal 25 Maret 2025 dan 4 Agustus 2025 sebagai berikut:

dalam ribu rupiah

LEMBAGA	PAGU EFEKTIF (TGL 13 FEBRUARI 2025)	BUKA BLOKIR I (TGL 25 MARET 2025)	BUKA BLOKIR II (TGL 4 AGUSTUS 2025)	PAGU EFEKTIF TOTAL APBN TA 2025	
	Α	В	С	D = A + B + C	
Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan (BNPP)/ Basarnas	1.088.431.570	126.974.160	272.291.659	1.487.697.389	

2. Komisi V DPR RI memahami penjelasan Kementerian Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Serta Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan (BNPP)/ Basarnas dalam RAPBN TA 2026 berdasarkan Surat Bersama Menteri PPN/ Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan RI Nomor: S-505/MK.03/2025 dan B-621/D.9/PP.04.03/07/2025 tanggal 24 Juli 2025 berperihal Pagu Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga dan DAK TA 2026, dan Penyelesaian RKA-K/L TA 2026 sebagai berikut:

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA/ UNIT ORGANISASI/ PROGRAM	PAGU KEBUTUHAN TA.2026	PAGU INDIKATIF TA.2026	Buku I RUU Tentang APBN 2026	Pergeseran Antar Unit Eselon I	Usulan Pagu Alokasi (Pasca Nota Keuangan)	Selisih Pagu Alokasi (Pasca Nota Keuangan) dengan Pagu Indikatif	Selisih/ Backlog Pagu Nota Keuangan Dengan Pagu Kebutuhan
		Α	В	С	D	E	F = E - B	G = E - A
1.	Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal	3.368.705.229	1.591.750.630	2.504.226.052		2.504.226.052	912.475.422	(864.479.177)
a.	Sekretariat Jenderal	507.319.944	340.223.975	463.543.570	17.118.181	480.661.751	140.437.776	(26.658.193)
b.	Inspektorat Jenderal	57.657.750	6.913.675	8.886.750	14.447.297	23.334.047	16.420.372	(34.323.703)
C.	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	360.208.375	36.963.135	39.324.915	178.895.494	218.220.409	181.257.274	(141.987.966)
d.	Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal	346.586.501	213.194.535	216.995.002	131.209.344	348.204.346	135.009.811	1.617.845
e.	Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	74.276.088	16.925.828	20.926.648	27.286.524	48.213.172	31.287.344	(26.062.916)
f.	Badan Pengembangan dan Informasi Desa dan Daerah Tertinggal	128.428.973	14.719.725	21.898.408	46.565.124	68.463.532	53.743.807	(59.965.441)
g.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal	1.894.227.598	962.809.757	1.732.650.759	(415.521.964)	1.317.128.795	354.319.038	(577.098.803)

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA/ UNIT ORGANISASI/ PROGRAM	PAGU KEBUTUHAN TA.2026	PAGU INDIKATIF TA.2026	Buku I RUU Tentang APBN 2026	Pergeseran Antar Unit Eselon I	Usulan Pagu Alokasi (Pasca Nota Keuangan)	Selisih Pagu Alokasi (Pasca Nota Keuangan) dengan Pagu Indikatif	Selisih/ Backlog Pagu Nota Keuangan Dengan Pagu Kebutuhan
		Α	В	С	D	E	F = E - B	G = E - A
2.	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan/ BASARNAS	2.272.381.124	1.011.768.359	1.409.675.969	0	1.409.675.969	397.907.610	(862.705.155)
a.	Program Dukungan Manajemen	1.192.536.704	732.110.374	844.993.881	0	844.993.881	112.883.507	(347.542.823)
b.	Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana	1.079.844.420	279.657.985	564.682.088	0	564.682.088	285.024.103	(515.162.332)

Selanjutnya Komisi V DPR RI bersama dengan Kementerian Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Serta Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan (BNPP)/ Basarnas akan memperjuangkan kenaikan anggaran sesuai pagu kebutuhan melalui mekanisme pembahasan RUU tentang APBN di DPR RI.

## III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 18.05.WIB.

Jakarta, 8 September 2025

KETUA RAPAT, ttd

## LASARUS

WAKIL MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, <u>ttd</u>

KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN, ttd

**AHMAD RIZA PATRIA** 

**MUHAMMAD SYAFII**